



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Suai
27 Mei 2019

Pengadilan Distrik Suai menghadapi masalah serius terkait bahan bakar untuk transportasi operasional sejak Januari 2019 sehingga mempengaruhi fungsi reguler pengadilan

Sejak awal Januari 2019 Pengadilan Distrik Suai telah mengalami masalah serius terkait bahan bakar untuk kendaraan operasional yang berdampak serius pada jumlah kasus yang diadili selama beberapa bulan terakhir karena pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para pihak dan banyak kasus telah tertunda untuk waktu yang cukup lama. Misalnya, pada bulan Maret 2019 pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat perintah atau pemberitahuan sebanyak sekitar 200 kasus.

JSMP mencatat bahwa situasi ini memiliki efek negatif pada persidangan, karena jumlah kasus yang diadili tahun ini menurun secara dramatis dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pemantauan JSMP terhadap kasus-kasus yang mencapai putusan akhir pada 2018 dan 2019 menunjukkan perbedaan besar. Pada Januari 2018, Pengadilan Distrik Suai memutuskan 28 kasus. Pada Februari 2018 ada 7 kasus dan pada Maret 2018 ada 11 kasus. Namun, berdasarkan pemantauan JSMP atas kasus-kasus berkarakter kekerasan berbasis gender yang mencapai putusan akhir, hanya ada 2 kasus di bulan Januari, 1 kasus di bulan Februari dan 3 kasus di bulan Maret 2019.

Ketua Pengadilan Negeri Suai Alvaro Maria Freitas¹ menyatakan bahwa situasi ini terjadi karena mereka tidak memiliki dana untuk membeli bahan bakar untuk kendaraan operasional untuk memberikan pemberitahuan kepada para pihak pada tahun 2017 dan 2018. Situasi ini semakin memburuk lebih lanjut pada awal Januari 2019 hingga sekarang. Oleh karena itu, Pengadilan Distrik Suai, yang meliputi Distrik Covalima,

¹ Wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Suai, Maret 2019

Same-Manufahi, Bobonaro dan Ainaro hanya dapat melakukan beberapa kali persidangan selama beberapa bulan terakhir.

“Masalah ini serius karena merusak kinerja sehari-hari dan berfungsinya pengadilan yang hampir macet. Lembaga-lembaga relevan dan kompeten, khususnya Pengadilan Banding, perlu segera dan menangani masalah-masalah ini untuk menjamin bahwa pengadilan dapat berfungsi secara normal dan untuk memastikan hak-hak dasar tersebut mengenai pengadilan yang cepat dan dapat dijangkau tanpa penundaan yang tidak perlu, ”kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Selama periode ini JSMP telah mengamati pengadilan secara terus menerus menjadwalkan agenda penundaan persidangan hingga saat ini, meskipun beberapa kasus sangat sederhana, karena tidak ada kepastian tentang mendapatkan bahan bakar. Ada bukti yang menunjukkan bahwa pengadilan memberi tahu para pihak melalui jalur tidak resmi, misalnya, memberi tahu para pihak melalui kepala desa, atau orang lain yang menghadiri pengadilan - dan bahkan dalam beberapa kasus memberi tahu para korban atau keluarga para pihak dengan cara yang tidak menjamin bahwa pemberitahuan tersebut benar-benar akan mencapai target yang dimaksud.

Keadaan ini telah mengakibatkan banyak kasus ditunda karena para pihak belum diberi tahu dan/atau beberapa diantara telah diberitahukan tetapi mereka tidak hadir dan pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pihak karena pemberitahuan tidak dilakukan melalui yang sesuai dan jalur yang sah, yaitu melalui petugas pengadilan.

Selain masalah dengan bahan bakar, Pengadilan Distrik Suai juga hanya memiliki satu mobil operasional yang digunakan untuk mengeluarkan surat perintah pemberitahuan, surat rogatori, perintah pembebasan, mengantar surat permohonan dan banding ke Pengadilan Banding, serta mengangkut petugas pengadilan ke persidangan keliling apabila pengadilan keliling dilakukan di distrik-distrik.

JSMP juga menemukan bahwa daerah di sekitar Pengadilan Distrik Suai adalah bahaya kesehatan dan tidak higienis karena tidak ada air untuk kamar mandi dari tahun 2015 hingga sekarang. Ini telah merugikan aktor-aktor pengadilan, petugas pengadilan, staf administrasi, dan masyarakat secara umum dalam hal penggunaan kamar mandi.

Selama periode ini pengadilan harus meminta bantuan dari pemadam kebakaran untuk memberi mereka air atau hanya menggunakan air hujan selama musim hujan. Namun, selama musim kemarau aktor peradilan harus bolak-balik ke tempat tinggal mereka dan petugas pengadilan perlu menemukan cara lain untuk menggunakan toilet di masyarakat.

Situasi ini telah merugikan korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan anak di bawah umur yang perlu menggunakan kamar mandi. JSMP percaya bahwa dalam keadaan seperti itu para korban harus menunggu sampai mereka tiba di rumah karena mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk diminta menggunakan kamar mandi orang lain.

Anggaran Belanja Negara 2018 melakukan pengurangan/pemangkasan yang besar-besaran dalam uang yang diusulkan untuk sektor peradilan, dan beberapa item dihilangkan secara total. Anggaran di tingkat institusi untuk semua pengadilan (Pengadilan Banding, pengadilan distrik dan Dewan Tertinggi Kehakiman) untuk kategori Barang dan Layanan pada 2017 adalah US \$ 1.899.000, dikurangi menjadi US\$ 892.000 pada 2018. Ternyata dana ini dialokasikan untuk menutup biaya perjalanan lokal, pembelajaran bahan bakar untuk kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan, perlengkapan kantor, pemeliharaan peralatan dan pembangunan serta biaya operasional. Sementara itu, pengadilan distrik mengalokasikan dana sebesar US \$ 48.000 pada 2017² yang dikurangi menjadi nol, atau dengan kata lain dihapus pada 2018³. Pada akhirnya, dana ini dialokasikan untuk menutupi biaya bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor untuk pengadilan distrik untuk memberikan pemberitahuan dan untuk layanan operasional penting lainnya.

Direktur Keuangan di Pengadilan Banding Jaime Freitas⁴ menjelaskan bahwa Pengadilan Banding tidak dapat menjawab kekurangan ini, karena pada tahun 2017 dan 2018 Pengadilan Banding hanya menggunakan anggaran *duodecimal* sebagai akibat dari kebuntuan politik. Namun, Pengadilan Banding akan berusaha untuk memasukkan dana ini sebagai prioritas dalam anggaran yang diusulkan untuk Pengadilan Banding untuk tahun 2019 dan jika ini disetujui, maka semua keadaan ini dapat diatasi.

JSMP memahami bahwa pada tahun 2017 dan 2018 semua institusi Negara menghadapi tantangan yang sama yang dihadapi oleh pengadilan. Namun, sekarang anggaran telah kembali normal dan total anggaran untuk pengadilan pada tahun 2019 adalah US\$ 7.541.000 juta atau meningkat US \$ 2.974.000 juta dari 2018 dan kategori barang dan jasa telah meningkat menjadi US\$ 3.101.000 juta dari US \$ 892.000 juta yang mencakup biaya yang disebutkan di atas, misalnya perjalanan lokal, bahan bakar untuk kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan, perlengkapan kantor, pemeliharaan peralatan dan

² Halaman 623 Buku 4B, APBN 2017

³ Halaman 509 Buku 4B, APBN 2018

⁴ Wawancara dengan JSMP pada bulan Februari 2019

bangunan serta biaya operasional⁵. Bahan bakar untuk kendaraan operasional untuk pengadilan distrik yang jumlahnya nol pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 32.000 pada tahun 2019.

JSMP merekomendasikan agar Pengadilan Tinggi mengambil langkah segera dan mendesak untuk menanggapi tantangan dan kekurangan ini untuk memastikan pengadilan dapat berfungsi secara normal dan memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan keadilan bagi semua sesuai dengan hukum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl
Situs web: <http://jsmp.tl/>

⁵ Halaman 564 Buka 4 B, APBN 2019